

MANAJEMEN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA BUKITTINGGI DI BIDANG KETAHANAN PANGAN TAHUN 2021-2023

Oleh: Jufri Ramdani

Pembimbing: Agus Susanto S.IP, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H. R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Food security is a strategic issue that requires serious attention, especially amid the threats of inflation, climate change, limited land, and distribution disruptions. This research aims to describe the management of the Agriculture and Food Office of Bukittinggi City in the field of food security from 2021 to 2023. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques in the form of interviews, documentation, and literature studies. The results show that the Agriculture and Food Office of Bukittinggi City has implemented managerial functions including planning, organizing, executing, and supervising food security programs. Various programs such as the Affordable Food Movement, provision of superior seeds, local food diversification, and farmer empowerment have been carried out to strengthen food security. However, several challenges still hinder the achievement of targets, such as the limited area of agricultural land, high inflation, pest attacks, and climate change.

Keywords: Management, food security, local government, governance management.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ketahanan pangan merupakan isu strategis yang telah menjadi perhatian global maupun lokal. World Food Summit (1996) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap makanan yang cukup, aman, dan bergizi guna memenuhi kebutuhan hidup yang aktif dan sehat (Pérez-Escamilla, 2022). Dalam konteks nasional, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 menekankan bahwa ketahanan pangan harus mencakup kecukupan, keamanan, keanekaragaman, dan keterjangkauan, serta menghormati nilai-nilai agama dan budaya lokal secara berkelanjutan.

Di tingkat lokal, Kota Bukittinggi yang terletak di Provinsi Sumatera Barat juga menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Meskipun memiliki potensi geografis dan ekologis yang mendukung dikelilingi oleh pegunungan dan berada di ketinggian 909–941 mdpl kota ini juga mengalami tekanan pembangunan yang berdampak pada sektor pertanian. Kota Bukittinggi terdiri atas tiga kecamatan dan 24 kelurahan, dengan total luas wilayah 25,239 km² (BPS Kota Bukittinggi, 2023). Wilayah ini memiliki tradisi pertanian yang kuat dan potensi yang besar untuk mendukung swasembada dan ketahanan pangan daerah.

Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) telah menjalankan berbagai program untuk meningkatkan ketahanan pangan, antara

lain Gerakan Pangan Murah (GPM), pembangunan infrastruktur pertanian, penyediaan bibit unggul, diversifikasi pangan, serta pemberdayaan petani. Langkah-langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 17 Tahun 2015 yang menjadikan ketahanan pangan sebagai urusan wajib non-pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Ketahanan pangan terdiri dari tiga pilar utama: ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan. Dalam aspek ketersediaan, Kota Bukittinggi mampu menjamin pasokan pangan melalui aktivitas perdagangan yang cukup aktif, baik dari dalam maupun luar daerah. Data Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi (2023) menunjukkan bahwa konsumsi per kapita masyarakat terhadap pangan seperti padi (169,80 kg/tahun), sayur-sayuran (57,89 kg/tahun), dan daging (35,26 kg/tahun) menunjukkan ketersediaan pangan yang relatif baik.

Dari sisi aksesibilitas, Kota Bukittinggi memiliki tingkat kemiskinan sebesar 5,78% pada tahun 2023, lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk memperoleh pangan (BPS Sumbar, 2023). Namun demikian, tantangan tetap ada dalam aspek distribusi dan keterjangkauan harga, terutama di tengah gejolak inflasi yang berulang setiap tahunnya.

Pemanfaatan pangan, yang mencakup pola konsumsi dan penyerapan zat gizi oleh tubuh, juga masih menjadi tantangan. Prevalensi stunting di Kota Bukittinggi tercatat sebesar 12,8% pada tahun 2023, sedikit di atas rata-rata provinsi. Angka ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam pemanfaatan gizi, meskipun ketersediaan pangan mencukupi.

Fungsi-fungsi manajemen publik menurut Hasibuan (2000) perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan—menjadi kunci dalam menilai efektivitas pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Dalam aspek perencanaan, Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengintegrasikan isu ketahanan pangan ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RKPD. Namun, tantangan seperti inflasi pangan (5,23% pada 2023) dan belum optimalnya mitigasi dampak perubahan iklim menunjukkan bahwa perencanaan masih belum adaptif terhadap dinamika eksternal.

Pengorganisasian dalam pengelolaan ketahanan pangan dilakukan melalui Dinas Pertanian dan Pangan berdasarkan Perwako Nomor 62 Tahun 2016. Meskipun struktur kelembagaan sudah jelas, tantangan tetap muncul dalam pengelolaan sumber daya, khususnya keterbatasan lahan pertanian produktif yang terus mengalami penurunan (dari 416 ha pada 2021 menjadi 371 ha pada 2023).

Pada sisi pelaksanaan, data menunjukkan bahwa serangan hama dan rendahnya adopsi teknologi menjadi hambatan besar dalam meningkatkan produktivitas. Misalnya, kejadian serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) meningkat menjadi 41 kasus pada 2022 dan masih tinggi pada 2023, dengan dampak terhadap luas lahan mencapai 47 ha. Infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani dan irigasi pun belum memadai, jauh dari kebutuhan ideal.

Dalam aspek pengawasan, masih ditemukan ketimpangan pembangunan antar kecamatan dan lemahnya sistem evaluasi atas distribusi pangan dan stabilisasi harga. Tidak adanya sistem monitoring dan pengendalian pasar yang kuat menyebabkan ketidakpastian pasokan dan fluktuasi harga yang tidak terkendali.

Secara keseluruhan, kendala dalam perencanaan strategis, minimnya sumber daya, lemahnya pelaksanaan program, serta terbatasnya mekanisme pengawasan

menjadi faktor-faktor yang menghambat keberhasilan manajemen ketahanan pangan di Kota Bukittinggi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana manajemen dijalankan oleh Dinas Pertanian dan Pangan, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menghalangi pencapaian ketahanan pangan yang ideal.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi dalam bidang ketahanan pangan pada tahun 2021–2023, dengan fokus pada efektivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam penguatan tata kelola ketahanan pangan di tingkat daerah serta sebagai rekomendasi kebijakan berbasis data yang dapat diimplementasikan secara berkelanjutan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian yang akan dibahas adalah:

- a. Bagaimana manajemen Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi di bidang ketahanan pangan pada tahun 2021– 2023?
- b. Apa saja faktor-faktor yang menghambat manajemen Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi di bidang ketahanan pangan pada tahun 2021–2023??

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mendeskripsikan manajemen Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi di bidang ketahanan pangan tahun 2021-2023.
- b. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor menghambat manajemen Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi di bidang ketahanan pangan tahun 2021-2023.

Tinjauan Teori Manajemen Pemerintahan

Manajemen pemerintahan atau dikenal juga sebagai *public management* merupakan suatu proses yang sistematis dan terencana yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola sumber daya publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien dan efektif. Dalam konteks organisasi pemerintahan, manajemen menjadi unsur penting dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab birokrasi, karena melalui pendekatan manajerial, institusi pemerintah dapat merancang, mengatur, melaksanakan, dan mengawasi program-program pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.

Menurut Hasibuan (2000), strategi dalam organisasi pemerintahan dapat dirumuskan melalui penerapan empat fungsi utama manajemen, yaitu:

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan proses awal yang vital dalam manajemen, di mana pemerintah menentukan tujuan yang ingin dicapai serta strategi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Dalam konteks pemerintahan, perencanaan berarti menyusun arah kebijakan pembangunan, merumuskan prioritas program, serta merancang kegiatan yang relevan dengan kebutuhan publik dan tantangan lingkungan strategis.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Setelah perencanaan dirancang, organisasi pemerintahan memerlukan struktur kelembagaan yang dapat mengimplementasikan rencana tersebut. Fungsi pengorganisasian mencakup pengaturan tugas, pembagian wewenang, pengelompokan aktivitas, serta penempatan sumber daya manusia dan sumber daya fisik secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan adalah proses operasionalisasi dari rencana dan struktur organisasi yang telah dibentuk. Pada tahap ini, pemerintah berusaha menggerakkan seluruh sumber daya, baik aparatur maupun sarana, untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana. Efektivitas pelaksanaan sangat ditentukan oleh motivasi pegawai, kepemimpinan, komunikasi organisasi, dan efisiensi mekanisme kerja.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan proses pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan agar tetap berada pada jalur yang telah direncanakan. Dalam fungsi ini, pemerintah melakukan pengukuran kinerja, membandingkan hasil dengan target, serta mengoreksi penyimpangan yang terjadi. Pengawasan yang baik memungkinkan pengambilan keputusan adaptif dalam merespons dinamika di lapangan.

Keempat fungsi manajemen tersebut menjadi kerangka analitis untuk menilai kinerja instansi pemerintah, termasuk dalam hal pengelolaan sektor strategis seperti ketahanan pangan.

Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan konsep multidimensional yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan kesehatan. Menurut definisi Oxfam (2001), ketahanan pangan adalah kondisi ketika setiap orang, dalam setiap waktu, memiliki akses dan kontrol terhadap pangan yang cukup dalam jumlah dan kualitas demi menjalani kehidupan yang aktif dan sehat. Terdapat dua aspek utama dalam konsep ini, yakni ketersediaan pangan dan akses terhadap pangan.

Chung et al. (1997) menyempurnakan definisi ini dengan menyatakan bahwa ketahanan pangan terdiri dari tiga pilar utama, yaitu:

Ketersediaan (*Availability*): menyangkut jumlah dan keberadaan pangan, baik dari hasil produksi lokal, impor, maupun cadangan.

Akses (*Access*): mencakup kemampuan ekonomi maupun fisik masyarakat untuk memperoleh pangan, baik melalui produksi sendiri, pembelian, atau bantuan.

Pemanfaatan (*Utilization*): berkaitan dengan bagaimana masyarakat mengolah, menyimpan, dan mengonsumsi pangan, serta kemampuan tubuh untuk menyerap zat gizi dari makanan tersebut.

Dalam konteks rumah tangga, ketahanan pangan dapat diamati dari indikator seperti kecukupan konsumsi pangan, stabilitas pangan dalam rumah tangga, kualitas dan keragaman gizi, serta kemampuan akses pangan baik secara fisik maupun ekonomi (Baliwati, 2004).

Di Indonesia, konsep ketahanan pangan diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, yang kemudian diperkuat oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012. Dalam kerangka tersebut, ketahanan pangan meliputi lima komponen penting, yaitu:

a. Ketersediaan

Pangan harus tersedia dalam jumlah yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dari sumber nabati maupun hewani.

b. Mutu Pangan

Pangan yang tersedia harus memiliki kualitas gizi yang baik dan sesuai standar kesehatan, mencakup kebutuhan energi dan zat gizi seperti protein, lemak, vitamin, dan mineral.

c. Keamanan Pangan

Pangan harus bebas dari bahan berbahaya dan layak dikonsumsi secara aman oleh masyarakat.

d. Pemerataan Distribusi

Distribusi pangan harus berlangsung merata ke seluruh wilayah sehingga tidak terjadi kelangkaan dan ketimpangan antar daerah.

e. Keterjangkauan Harga

Pangan harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau.

Dengan demikian, ketahanan pangan bukan hanya soal kecukupan jumlah makanan, tetapi juga mencakup aspek kualitas, keamanan, keadilan distribusi, dan keterjangkauan. Dalam praktiknya, pencapaian ketahanan pangan menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan daerah, karena berdampak langsung terhadap kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni suatu metode yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan perspektif partisipan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami proses manajerial dalam organisasi publik secara kontekstual dan komprehensif. Menurut Strauss dan Corbin (2007), pendekatan kualitatif digunakan untuk menyelidiki kehidupan sosial, perilaku, struktur organisasi, dan interaksi sosial yang tidak dapat dijelaskan melalui metode kuantitatif. Hal ini diperkuat oleh Farida (2008), yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif bersifat eksploratif dan menekankan pemahaman subjektif terhadap makna di balik data empiris.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai realitas manajemen Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi dalam bidang ketahanan pangan. Menurut Nazir (2014), pendekatan deskriptif kualitatif digunakan

untuk menyelidiki fenomena yang tengah berlangsung dalam masyarakat dengan tujuan memberikan gambaran yang utuh dan mendalam. Penelitian ini relevan untuk menganalisis praktik manajemen publik, khususnya dalam konteks implementasi kebijakan ketahanan pangan di tingkat daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi ini dilandasi oleh pertimbangan bahwa Bukittinggi memiliki karakteristik geografis dan historis yang kuat di bidang pertanian, serta potensi sumber daya alam yang relevan untuk mendukung ketahanan pangan lokal. Penelitian dilakukan selama dua bulan, yaitu Desember 2024 hingga Januari 2025, mencakup tahap observasi, pengumpulan data lapangan, dan analisis.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama yaitu, Data Primer Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui teknik wawancara mendalam terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan ketahanan pangan. Informan utama meliputi pejabat struktural dan fungsional di Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi, kelompok tani, petani lokal, serta pelaku usaha di sektor pangan. Wawancara dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan observasional guna menangkap dinamika dan kendala manajerial secara autentik.

Data Sekunder Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, buku, artikel jurnal, dan sumber daring yang relevan. Dokumen pendukung mencakup Neraca Bahan Makanan (NBM), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), data kelembagaan kelompok tani, dan Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat interpretasi terhadap temuan di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yang dipilih secara purposif, yaitu teknik pemilihan berdasarkan

pertimbangan relevansi dan kompetensi informan terhadap fenomena yang diteliti (Hidayat, 2017). Pemilihan informan didasarkan pada jabatan, keterlibatan dalam kebijakan ketahanan pangan, dan pengalaman mereka dalam proses manajerial di instansi terkait. Informan yang dipilih terdiri dari pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan, serta kelompok pelaku utama di lapangan, seperti kelompok tani, petani, dan pelaku usaha. Pemilihan informan dilakukan dengan mengacu pada posisi strategis mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program ketahanan pangan selama tahun 2021–2023. Untuk memperoleh data yang mendalam dan relevan dalam menjawab rumusan masalah penelitian, digunakan dua teknik utama dalam pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi. Kedua teknik ini dipilih untuk mendukung pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan yang telah ditentukan. Teknik ini dipilih untuk menggali informasi secara mendalam terkait fenomena yang menjadi fokus penelitian, yaitu manajemen ketahanan pangan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi. Menurut Creswell dan Creswell (2017), wawancara dalam penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih rinci mengenai pengalaman, persepsi, dan pengetahuan para informan. Dalam praktiknya, peneliti menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur agar proses penggalan data tetap fleksibel namun terarah sesuai fokus penelitian. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan program, hingga hambatan dalam pengelolaan ketahanan pangan.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber tertulis

yang relevan dengan fokus penelitian. Data dokumentasi mencakup literatur akademik seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, serta dokumen kelembagaan yang berasal dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi. Dokumen-dokumen tersebut di antaranya meliputi Neraca Bahan Makanan (NBM), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA-SKPD), data kelembagaan kelompok tani, dan laporan kinerja dinas. Teknik ini bertujuan untuk melengkapi dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh melalui wawancara serta menyediakan konteks empiris untuk mendukung analisis data yang dilakukan peneliti.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Suryabrata, 2018), yang terdiri dari beberapa tahap utama: reduksi data, penyajian data, deskripsi hasil penelitian, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN PERENCANAAN

Perencanaan program ketahanan pangan di Kota Bukittinggi disusun dengan memperhatikan sinkronisasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD sebagai dokumen strategis lima tahunan memuat visi, misi, tujuan, strategi, serta program pembangunan daerah yang menjadi acuan utama bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Sinkronisasi ini penting untuk memastikan bahwa program ketahanan pangan berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah, baik dalam aspek ketersediaan pangan, stabilitas harga, maupun keberlanjutan sektor pertanian.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Drs. Hendry, ME, menunjukkan bahwa perencanaan dilakukan melalui koordinasi lintas pihak, termasuk OPD terkait, DPRD, dan pemangku kepentingan non-pemerintah.

Pemerintah daerah memandang penting integrasi program ketahanan pangan dengan perencanaan pembangunan secara keseluruhan, serta mendorong pencarian dukungan dana dari pemerintah pusat dan provinsi. Strategi perencanaan tahun 2023 meliputi peningkatan produktivitas pertanian, pengelolaan cadangan pangan, pengendalian inflasi pangan melalui gerakan pangan murah, diversifikasi pangan, pemanfaatan teknologi pertanian, penguatan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pertanian. Seluruh strategi ini diarahkan untuk mendukung misi ketujuh “Bukittinggi Hebat” di sektor pertanian dan meningkatkan ketahanan pangan berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat, khususnya kelompok tani, menjadi elemen penting dalam proses perencanaan. Kelompok tani seperti Bungo Padi dilibatkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan dan kecamatan, serta berdiskusi aktif dengan penyuluh pertanian untuk menentukan kegiatan peningkatan produksi. Menurut Irmen, Ketua Kelompok Tani Bungo Padi, keterlibatan sejak tahap perencanaan memberikan rasa memiliki terhadap program sehingga meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan.

Dengan demikian, perencanaan ketahanan pangan di Kota Bukittinggi tahun 2023 menunjukkan pola kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Sinkronisasi dengan RPJMD, dukungan anggaran yang proporsional, dan keterlibatan aktif kelompok tani menjadi kunci dalam merancang program yang efektif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan.

PENGORGANISASIAN

Pengorganisasian ketahanan pangan di Kota Bukittinggi dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan melalui struktur organisasi yang dirancang sesuai Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan. Struktur ini diperkuat oleh regulasi pendukung, antara lain Perwako Nomor 58 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Perwako Nomor 21 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Non Tunai.

Secara fungsional, bidang ketahanan pangan terdiri dari tiga seksi utama:

1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, bertugas memantau ketersediaan bahan pangan pokok, menganalisis kerawanan pangan, dan merumuskan kebijakan berbasis data produksi, distribusi, serta stok pangan.
2. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan, mengatur dan mengawasi distribusi pangan agar merata dan terjangkau, mengelola cadangan pangan pemerintah daerah untuk mengantisipasi gejolak harga atau situasi darurat, serta membangun kerja sama dengan distributor dan pelaku pasar.
3. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan, berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), melakukan pengawasan keamanan pangan dari hulu ke hilir, memberikan pelatihan higiene dan sanitasi, serta melakukan uji sampel pangan.

Hasil wawancara dengan pejabat struktural menunjukkan pembagian tugas yang jelas di setiap seksi telah berjalan efektif dalam mendukung misi ketahanan pangan. Misalnya, Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan memprioritaskan identifikasi potensi kerawanan akibat faktor alam, ekonomi, dan sosial. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan memastikan stabilitas harga serta

kelancaran distribusi. Sementara itu, Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan melakukan edukasi serta kontrol kualitas pangan yang beredar di masyarakat.

Selain pengelolaan internal dinas, pengorganisasian juga melibatkan kelompok tani sebagai mitra strategis. Partisipasi kelompok tani juga mencakup keterlibatan dalam pelatihan, penyuluhan, dan pemasaran bersama. Melalui kerja kolektif, petani mampu mengakses teknologi pertanian modern, mengoptimalkan penggunaan alat dan mesin, serta mengembangkan pasar lokal dengan membangun kemitraan bersama restoran, hotel, dan toko. Pendekatan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Petani dan Pembinaan Penyuluh, yang menegaskan pentingnya pembinaan kelompok tani sebagai instrumen peningkatan kapasitas produksi pangan secara berkelanjutan.

Dengan struktur organisasi yang solid, pembagian tugas yang jelas, mekanisme koordinasi yang efektif, serta keterlibatan aktif masyarakat melalui kelompok tani, pengorganisasian ketahanan pangan di Kota Bukittinggi telah dirancang untuk memastikan program berjalan optimal, berdaya guna, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

PELAKSANAAN

Pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan di Kota Bukittinggi dijalankan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Peraturan ini menjadi landasan hukum strategis dalam pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menjamin stabilitas pasokan dan akses pangan masyarakat secara berkelanjutan.

Kebijakan tersebut diimplementasikan melalui serangkaian program terencana

dan terkoordinasi yang melibatkan berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah, legislatif, maupun non-pemerintah.

pemerintah Kota Bukittinggi telah melaksanakan program ketahanan pangan yang mencakup peningkatan produktivitas pertanian, pengelolaan cadangan pangan, gerakan pangan murah, diversifikasi pangan, pemanfaatan teknologi pertanian, penguatan infrastruktur pertanian, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pertanian.

Dinas Pertanian dan Pangan menegaskan komitmennya dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan melalui perencanaan matang, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi aktif masyarakat. Sinergi antara pemerintah, kelompok tani, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi modal penting bagi keberhasilan program.

PENGAWASAN

Pengawasan ketahanan pangan di Kota Bukittinggi dilaksanakan melalui mekanisme terintegrasi yang melibatkan berbagai perangkat daerah, dengan Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) sebagai instansi teknis utama. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 62 Tahun 2016, DPP memiliki kewenangan dalam pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kesehatan hewan, penyuluhan, kelembagaan, hingga urusan ketahanan pangan secara umum. Pelaksanaantugas tersebut dipertegas dalam Peraturan Wali Kota Bukittinggi yang mengatur struktur organisasi dan fungsi teknis DPP, termasuk tanggung jawab penyusunan rencana teknis, pelaksanaan monitoring dan evaluasi program, serta pengawasan terhadap distribusi, harga, dan ketersediaan pangan di wilayah kota. Dukungan regulasi juga diperkuat melalui Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa pengawasan pangan merupakan urusan

wajib daerah, sehingga memberikan legitimasi penuh bagi DPP dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem pangan lokal.

Dengan dasar hukum yang kuat, DPP Kota Bukittinggi tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai aktor kunci yang memastikan program ketahanan pangan berjalan sesuai perencanaan, efisien dalam penggunaan anggaran, dan responsif terhadap tantangan di lapangan. Kepala DPP, Drs. Hendry, ME, menegaskan bahwa pengawasan pangan meliputi tiga aspek utama, yakni: keamanan pangan, pengawasan distribusi dan harga pangan, serta kepatuhan terhadap regulasi. Pemerintah Kota Bukittinggi berupaya memastikan sistem pangan yang aman, terjangkau, dan sesuai regulasi, sehingga dapat mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan. Sinergi antara regulasi yang kuat, peningkatan kapasitas SDM, pengawasan pasar, kepatuhan hukum, serta partisipasi masyarakat menjadi fondasi utama dalam menjaga kesejahteraan pangan di kota ini.

Faktor-Faktor Penghambat Manajemen Pemerintah Kota Bukittinggi di Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2021-2023

Ketahanan pangan di Kota Bukittinggi tidak hanya berkaitan dengan aspek produksi, tetapi juga meliputi distribusi, konsumsi, koordinasi antar sektor, dan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat. Hambatan yang dihadapi bersumber dari berbagai dimensi, mulai dari kondisi alam, sosial, ekonomi, hingga keterbatasan dalam manajemen kebijakan. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi, Drs. Hendry, ME, menegaskan bahwa hambatan ini memerlukan pemahaman komprehensif agar strategi peningkatan ketahanan pangan dapat dirumuskan secara efektif. Sejalan dengan itu, Kabid Pangan, Ir. Nelfia, menyoroti tantangan utama berupa keterbatasan lahan, fluktuasi harga pangan, perubahan iklim, serangan hama, keterbatasan infrastruktur dan teknologi

pertanian, serta ketergantungan pada pasokan eksternal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap manajemen Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi dalam bidang ketahanan pangan pada periode 2021–2023, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi manajerial yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan telah berjalan, namun belum mencapai tingkat optimal dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan yang semakin kompleks.

Perencanaan telah mengarah pada ketersediaan dan stabilitas pangan, tetapi kurang adaptif terhadap dinamika lokal, terbukti dari inflasi pangan 5,23% pada 2023 dan lemahnya mitigasi risiko iklim serta fluktuasi produksi. Pengorganisasian kelembagaan sudah terbentuk, namun belum efektif menahan penurunan lahan produktif dan masih bergantung pada pasokan eksternal.

Pelaksanaan program seperti penyediaan bibit unggul, urban farming, dan Gerakan Pangan Murah, terkendala serangan OPT, rendahnya adopsi teknologi, terbatasnya infrastruktur, dan minimnya kapasitas pelaksana. Pengawasan juga belum maksimal karena lemahnya monitoring, pengendalian harga, dan mekanisme umpan balik. Secara keseluruhan, penguatan perencanaan berbasis data dan risiko, optimalisasi sumber daya lokal, peningkatan kapasitas pelaksana, serta pengawasan partisipatif dan terintegrasi menjadi kunci dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pertanian dan Pangan. Pertama, perencanaan ketahanan pangan perlu berbasis data dan analisis risiko, dengan mempertimbangkan fluktuasi harga, dampak perubahan iklim, dan potensi kerawanan pangan lokal, didukung oleh

sistem informasi terintegrasi serta mekanisme peringatan dini. Kedua, perlindungan lahan pertanian produktif harus diperkuat melalui regulasi zonasi dan pengawasan alih fungsi lahan, disertai optimalisasi potensi lokal melalui pemberdayaan kelompok tani dan penguatan kelembagaan petani guna mengurangi ketergantungan terhadap pasokan eksternal. Ketiga, percepatan pembangunan infrastruktur pertanian (jalan usaha tani, irigasi, dan gudang penyimpanan) harus disesuaikan dengan kebutuhan riil, serta diiringi peningkatan akses petani terhadap teknologi modern melalui penyuluhan, pelatihan, dan kemitraan dengan lembaga riset maupun perguruan tinggi. Keempat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya penyuluh pertanian, diperlukan untuk memastikan program berjalan efektif dan sesuai kebutuhan petani. Kelima, reformulasi sistem pengawasan ketahanan pangan diperlukan agar lebih partisipatif, dengan memperkuat monitoring dan evaluasi serta menyediakan saluran umpan balik dari pelaksana teknis dan penerima manfaat, melibatkan pengawasan internal maupun eksternal secara transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, B. (2004). *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*. Kompas Media Nusantara. Jakarta.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (Edisi ke-5). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications..
- Dumasari, (2020). *Pembangunan pertanian mendahulukan yang tertinggal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Everitt, B. S., & Howell, D. C. (2005). *Penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa*. Surakarta: Cakra Books.
- Hasibuan, M. S. P. (2000). *Organisasi dan manajemen*. Jakarta: Rajawali Press.
- Thabroni, G. (2022). *Metode penelitian deskriptif kualitatif: Konsep & contoh*. Serupa.id.
- Suryabrata, S. (2018). *Metodologi penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutrisno, A. D., Cahyadi, W., & Taufik, Y. (2022). *Ketahanan pangan* (W. Kurniawan, Ed.). Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Untoro, D., & Halim. (2007). *Dasar-dasar administrasi dan kebijakan publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Winardi. (2000). *Manajer dan manajemen*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Winardi. (2003). *Entrepreneur dan entrepreneurship*. Jakarta: Prenada Media.
- Bukittinggi, P. K. (2023). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2023. In *RKPD Kota Bukittinggi 2023*.
- Bukittinggi, W. (2023). *Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi*. 7.
- Diyo, A. R. (2022). Keamanan Pangan Sebagai Usaha Perlindungan Kesehatan Masyarakat Dan Sebagai Hak Konsumen. *Jurnal Ilmu Sosial*, 1(7), 703–712.
- <https://doi.org/10.2307/2975855> Hasanah, L. (2022). Analisis Faktor-Faktor Pengaruh Terjadinya Impor Beras di Indonesia Setelah Swasembada Pangan Lutfianasari Hasanah Fakultas Ekonomi Universitas Tidar , Magelang Produksi Beras , Luas Lahan Panen , dan PDB . Analysis Of Factors Causing Rice Imports After F. Growth: *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 57–72.
- Miriza, W., Oktarina, Y., & Munajat. (2023). Manajemen Cadangan Pangan Sebagai Upaya Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1), 98–106.

- Pérez-Escamillab, S. de P. dan R. (2022). Ketahanan pangan. *Modul Referensi Ilmu Pangan*, 1–10.
- Suryana, A. (2014). Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025 : Tantangan dan Penangananya Toward Sustainable Indonesian Food Security 2025 : Challenges and Its Responses. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 32 No 2, 123–135.
- Sutrisno, A. D., Cahyadi, W., & Taufik, Y. (2022). *Ketahanan Pangan* (W. Kurniawan (ed.)). Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Victor Lumbanraja, I. F. (2023). Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan Politik Pangan : Upaya Membangun Kebijakan Ketahanan Pangan di Sumatera Utara. *Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan*, 2(2), 1–7.
<https://doi.org/10.32734/jkakp.v2i2.13354>
- Wibisono, G., & Yeni Widowaty. (2023). Urgensi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Terhadap Alih Fungsi Lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Krtha Bhayangkara*, 17(1), 93–106.
<https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1962>
- Wuli, R. N. (2023). Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Pertanian Untuk Menciptakan Petani Unggul Demi Mencapai Ketahanan Pangan. *Jurnal Pertanian Unggul*, 2(1), 1–15.
- Bukittinggi, D. P. dan P. (2021). *Profil Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi*. 40.
<https://pertanian.jogjakota.go.id/detail/index/13536>
- Anwar Hidayat. (2017). *Purposive Sampling – Pengertian, Tujuan, Contoh, Langkah, Rumus*. Statistikian.Com.
<https://www.bukittinggikota.go.id/>
<https://bukittinggikota.bps.go.id/>
[https://kaba12.co.id/bangun-ketahanan-pangan-lokal/](https://kaba12.co.id/bangun-ketahanan-pangan-daerah-bukittinggi-launching-sihp/)
<https://metrotalenta.online/pemko-bukittinggi-bangun-kestabilan-harga-ketahanan-pangan-nasional/>
<https://www.gramedia.com/literasi/ketahan-an-pangan/>
<https://lmsspada.kemdikbud.go.id/mod/page/view.php?id=72831>
- Thabroni, G. (2022). Metode penelitian deskriptif kualitatif (konsep & contoh). Serupa.id.
<https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif-kualitatif/>